

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di masa kini yang segalanya serba digital, transparansi informasi adalah suatu hal yang sangat penting. Pemerintah Republik Indonesia terus bertekad untuk menciptakan suatu tata kelola pemerintah yang baik atau biasa kita kenal sebagai istilah *good goverment governance* sebagai bentuk meningkatkan kepercayaan publik pada Lembaga pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, setiap pengguna anggaran negara baik yang berada pada Kementrian atau Lembaga, lalu Pemerintahan Daerah, hingga Lembaga Pemerintahan Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mewajibkan untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban anggaran berdasarkan standar yang ada sebagaimana standar tersebut diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, baik sebagai informasi umum, dasar analisis keuangan maupun sebagai upaya dalam meningkatkan kegiatan pengawasan pengelolaan anggaran negara.

Dengan menerbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010, menjadi suatu wujud upaya pemerintah untuk terus konsisten meningkatkan akuntabilitas penyajian laporan keuangan dilingkungan Pemerintahan. Didalam PP Nomor 71 Tahun 2010, ada dokumen pendukung yang berupa lampiran salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP Nomor 07) yang mengatur tentang penerapan aset tetap. PSAP Nomor 07 membahas *classification, recognition, measurement, initial valuation, post acquisition expenditure, depreciation, discontinuation and disposal*, dan *disclosure* memiliki keterkaitan dengan aset tetap yang dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia.

Tujuan dari ada Pernyataan Standar ini untuk mengatur dan sebagai dasar dari perlakuan akuntansi yang memiliki keterkaitan dengan aset tetap. Ruang lingkup dari

Muhammad Ferdi Andrasito, 2021

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pernyataan Standar ini mencakup seluruh Lembaga atau Instansi Pemerintah yang menyajikan laporan keuangan lembaganya. Penerapan akuntansi yang baik dalam pengelolaan aset tetap dapat memberikan dampak positif bagi berjalannya kegiatan pemerintahan. Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) menjelaskan bahwa Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan yang diperuntukan dalam kegiatan dari proses pemerintahan atau yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan akuntansi aset tetap sebagaimana dituangkan di dalam PSAP Nomor 07.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan suatu lembaga negara yang memiliki tugas utama yaitu memeriksa terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara seperti apa yang diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, pada pasal 2 dijelaskan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam melakukan kegiatan pemeriksaan terkait dengan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.

Pada prosesnya peneliti menemukan suatu fenomena tersebut menarik untuk dilakukan penelitian, yakni perubahan nilai aset tetap BPK RI yang sangat drastis, dari Rp 4,5 triliun menjadi Rp 8,8 triliun. Peneliti mencoba untuk mencari informasi apa yang terjadi pada laporan keuangan di BPK RI dengan cara mewawancarai pejabat yang memiliki tanggungjawab terkait dengan penatausahaan aset di BPK RI. Berdasarkan dari hasil riset serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti, fenomena kenaikan nilai tersebut terjadi karena adanya Program Nasional Pemerintah yakni revaluasi aset untuk seluruh Lembaga dan Kementrian.

“Pada tahun 2019 nilai aset kita itu naik drastic, terutama tanah karena adanya program nasional dari Pemerintah. Program nasional pemerintah itu, berupa penilaian kembali atau revaluasi aset.” (Manuskrip: SI.1 6 April 2021)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31	
		2019	2018
ASET			
Aset Lancar	5.5.a		
Kas Lainnya dan Setara Kas	5.5.a.1, 8	5,899,219,611	43,223,870,642
Belanja Dibayar di Muka	5.5.a.2, 9	365,650,226	8,081,642,144
Piutang Bukan Pajak	5.5.a.3, 10	917,662,114	616,722,457
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	5.5.a.4, 11	(81,098,836)	(79,594,140)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	5.5.a.5, 12	89,976,996	106,226,996
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	5.5.a, 13	(13,837,802)	(13,919,051)
Persediaan	5.5.a.6, 14	15,122,730,192	15,843,612,528
Jumlah Aset Lancar		22,300,302,501	67,778,561,576
Aset Tetap	5.5.b, 5.5.c, 15		
Tanah	5.5.b	5,980,428,125,661	1,989,704,672,051
Peralatan dan Mesin	5.5.b	1,991,163,973,440	1,971,544,524,387
Gedung dan Bangunan	5.5.b	2,508,643,269,633	2,332,971,508,643
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.b	390,041,392,700	352,549,239,113
Aset Tetap Lainnya	5.5.b	17,891,717,899	24,329,110,328
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.b	48,800,000	18,925,965,286
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.5.c	(2,086,930,963,768)	(2,163,812,348,922)
Jumlah Aset Tetap		8,801,286,315,565	4,526,212,670,886
Piutang Jangka Panjang	5.5.d, 16		
Tagihan TP/ TGR		3,055,767,909	3,196,262,033
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR	16	(2,588,888,511)	(2,696,178,366)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		466,879,398	500,083,667
Aset Lainnya	5.5.e, 17		
Aset Tak Berwujud	5.5.e, 17	163,565,836,169	176,965,980,064
Aset Lain-lain	5.5.e, 17	10,117,675,753	61,551,373,767
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	5.5.e, 17	(119,348,328,150)	(169,433,653,980)
Jumlah Aset Lainnya		54,335,183,772	69,083,699,851
JUMLAH ASET		8,878,388,681,236	4,663,575,015,980

Sumber: Laporan Keuangan BPK

Gambar 1. Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen.

Dari gambar tabel terlampir, dapat kita ketahui bahwa penyebab meningkatnya aset BPK ada pada aset tetap yang berupa tanah. Pada Gambar 1. dijelaskan bahwa jumlah aset tetap pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 90,38% dan pada tahun 2018 jumlah aset tetap BPK RI sebesar Rp 4,526,212,670,886 namun pada tahun 2019 menjadi Rp 8,801,286,315,565. Nilai yang mendorong kenaikan jumlah aset tetap tersebut ada pada pos Tanah, di tahun 2018 tercatat nilai tanah sebesar Rp

Muhammad Ferdi Andrasito, 2021

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1,989,704,672,051 dan pada tahun 2019 nilainya bertambah menjadi sebesar Rp 5,980,428,125,661. Berdasarkan hasil dari proses konfirmasi melalui wawancara kepada informan terkait, dijelaskan bahwa penyebab utama dari kenaikan Aset pada Neraca BPK RI dikarenakan adanya program nasional revaluasi dari pemerintah Indonesia. Program nasional revaluasi ini didasar oleh PerPres / Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah

“Tujuan revaluasi aset untuk mendapatkan nilai wajar dari Aset yang bersangkutan, untuk objek dari revaluasi terdiri dari Tanah, Bangunan dan JII, peralatan mesin tidak termasuk dalam objek reval, hanya 3 itu namun dibatasi perolehannya sampai 31 Desember 2015, maka dari itu nilai Tanah kita melonjak karena nilai wajar pada saat terjadinya reval atau penilaian kembali”
(Manuskrip: SI.1 6 April 2021)

Dari proses wawancara yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan kesempatan untuk mengutip data secara eksklusif dari laporan posisi Barang Milik Negara atau detail dari Neraca yang termasuk ke golongan aset tetap. Dalam prosesnya BMN dikelola dengan 11 siklus salah satunya adalah siklus penilaian. Pada siklus penilaian BMN, prosesnya dilakukan oleh penilai dari Kementerian Keuangan sebagaimana peneliti dapatkan dari proses prariset wawancara dengan informan yang ada.. Berikut peneliti lampirkan kutipan data tersebut.

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020
 TAHUN ANGGARAN 2020

UAPB : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Tanggal : 06/04/21 9:41 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	11,825,655,538
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,294,908,857
117114	Suku Cadang	95,036,656
117199	Persediaan Lainnya	2,965,844,155
131111	Tanah	5,920,800,077,963
132111	Peralatan dan Mesin	2,159,391,106,309
133111	Gedung dan Bangunan	2,544,162,750,759
134111	Jalan dan Jembatan	27,815,387,724
134112	Irigasi	35,206,691,612
134113	Jaringan	330,985,355,777
135111	Aset Tetap Renovasi	3,505,544,000
135121	Aset Tetap Lainnya	16,500,596,075
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	148,295,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,817,029,175,629)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(242,081,332,662)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(17,520,047,138)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(5,056,241,886)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(218,046,608,610)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(762,695,664)
162151	Software	81,885,513,183
162161	Lisensi	95,352,938,039
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	4,380,116,980
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	10,081,139,232
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	44,213,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(8,879,185,173)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(75,806,458,537)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(48,203,447,058)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(35,678,455)
J U M L A H		8,813,020,300,047

Sumber: Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset BPK RI.

Gambar 2. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi Tahun 2020

Gambar diatas merupakan contoh dari Laporan Posisi Barang Milik Negara BPK RI. Tidak sembarang orang dapat mengaksesnya karena data ini didapatkan secara eksklusif melalui informan kunci penelitian ini. Informan menjelaskan bahwa didalam laporan keuangan BPK terdapat laporan Barang Milik Negara (BMN), isi dari laporan

Muhammad Ferdi Andrasito, 2021

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

BMN itu merupakan item-item yang merincikan terkait aset aset yang dikategorikan sebagai BMN. Sebagaimana yang disajikan didalam gambar 2, gambar 2 merupakan neraca yang menyajikan aset-aset BMN. Dalam neraca tersebut dipaparkan aset-aset yang termasuk kedalam BMN ada beberapa akun, mulai dari item yang kecil sebagai contoh mulai dari barang konsumsi, bahan-bahan yang diperuntukkan sebagai bahan pemeliharaan, suku cadang, dan persediaan lainnya. Selain item-item kecil, terdapat juga aset yang memiliki nilai material seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Aset tetap lainnya. Berdasarkan jumlah dalam neraca BMN, Tanah merupakan pos yang memiliki nilai paling tinggi hampir 6 trilyun rupiah, tepatnya 5,9 trilyun rupiah. Dari perkembangan prariset penelitian, peneliti merasa perlu menganalisis proses dari pengelolaan BMN yang ada, hal tersebut bertujuan untuk menginformasikan terkait siklus pengelolaan BMN dan kendala dari proses revaluasi BMN di BPK RI.

Dari hasil wawancara peneliti kebeberapa informan di BPK RI, maka berdasarkan fenomena yang ada peneliti memiliki tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Seluruh Lembaga Pemerintahan wajib untuk melaporkan pertanggungjawabannya atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian kali ini difokuskan pada praktik penerapan Akuntansi Aset Tetap sesuai PSAP 07 yang dikerucutkan pada proses revaluasi aset tetap BMN pada BPK RI sebagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Biro Umum BPK yang terletak di Kantor BPK Pusat, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat, sudah sesuai dengan PSAP 07 atau belum, selain itu peneliti juga meneliti bagaimana proses pengelolaan Barang Milik Negara yang ada di BPK RI. Kegiatan yang peneliti lakukan guna mendapatkan

Muhammad Ferdi Andrasito, 2021

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

data yang valid secara langsung dengan wawancarai beberapa informan kunci yang memiliki kewenangan di bagian Penatausahaan Aset di Biro Umum BPK.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang ada, masalah dari penelitian akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini diantaranya;

- 1) Bagaimana penerapan PSAP 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 2) Bagaimana pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 3) Bagaimana proses revaluasi Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- 4) Bagaimana kendala dalam proses revaluasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang ada, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah;

- 1) Untuk memahami penerapan PSAP 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta kesesuaian penerapan Akuntansi Aset Tetap dengan Standar Akuntansi Pemerintah
- 2) Untuk memahami aktivitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- 3) Untuk memahami bagaimana proses revaluasi Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
- 4) Untuk memahami bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses revaluasi pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

Muhammad Ferdi Andrasito, 2021

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1.5 Manfaat Penelitian

Harapan dari hasil penelitian ini mampu memberikan suatu manfaat terkait dengan judul penelitian ini Penerapan PSAP 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada BPK RI, baik yang bersifat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Akan halnya manfaat dari penelitian ini lebih kurang:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang bagaimana penerapan akuntansi aset tetap di entitas pemerintahan, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan suatu referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Akhir yang dari penelitian ini, diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi berupa manfaat praktis bagi beberapa pihak berikut ini:

a. Bagi Peneliti Sendiri

Hasil dari penelitian ini dapat memperkenalkan lebih dalam dan memperluas pengetahuan terkait dengan penerapan akuntansi aset tetap dan pengelolaan Barang Milik Negara pada BPK RI.

b. Bagi Pihak Biro Umum BPK RI

Hasil yang diharapkan peneliti dari penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan serta pandangan baru bagi Biro Umum BPK RI dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penerapan perlakuan Akuntansi Aset Tetap guna mewujudkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

c. Bagi Masyarakat

Hasil yang diharapkan peneliti dari penelitian ini mampu menambah informasi dan gambaran mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada entitas pemerintahan serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.